



SALINAN

BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR **01** TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DUSUN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Dusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Dusun di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan...2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN::

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DUSUN DI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun;
4. Rio adalah pejabat Pemerintah Dusun yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Dusunnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Dusun dan Pemberdayaan Masyarakat Dusun.
6. Kepala DPMD adalah Kepala perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Dusun dan Pemberdayaan Masyarakat Dusun.
7. Jumlah Dusun adalah jumlah Dusun yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun, yang selanjutnya disingkat APBDus, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Dusun.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Pemerintah Pusat yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan.
10. Kepala KPPN adalah kepala instansi vertikal Pemerintah Pusat yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan.
11. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening Tempat Penyimpanan Uang Negara Yang Ditentukan Oleh Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara Untuk Menampung Seluruh Penerimaan Negara Dan Membayar Seluruh Pengeluaran Negara Pada Bank Sentral.

8. Rekening...4

12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Dusun, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Dusun yang menampung seluruh penerimaan Dusun dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Dusun dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
14. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
15. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan bupati ini meliputi:

- a. jumlah Dusun;
- b. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
- c. penetapan rincian Dana Desa;
- d. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
- e. prioritas penggunaan Dana Desa;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III JUMLAH DUSUN

Pasal 3

Jumlah Dusun dalam Kabupaten Bungo adalah 141 (seratus empat puluh satu) Dusun.

BAB IV...5

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA
KE SETIAP DUSUN

Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 5

Alokasi dasar setiap dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah dusun.

Pasal 6

- (1) Alokasi afirmasi setiap Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Dusun Tertinggal dan Dusun Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, dibagi kepada dusun-dusun dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan dusun, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan dusun.
- (2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan keuangan dusun dengan bobot 20%;
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan dusun dengan bobot 35%.

Pasal 8...6

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan dusun sebagaimana pada pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDus dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDus.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan dusun sebagaimana pada pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status dusun, status dusun terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Dusun} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Dusun = Alokasi Formula setiap Dusun

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Dusun terhadap total penduduk Dusun kabupaten Bungo;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Dusun terhadap total penduduk miskin Dusun kabupaten Bungo;

Z3 = rasio luas wilayah setiap Dusun terhadap total luas wilayah Dusun kabupaten Bungo;

Z4 = rasio IKG setiap Dusun terhadap IKG Dusun kabupaten Bungo;

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Bungo

BAB V...7

BAB V
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Dusun di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Rio menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala DPMD, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDus;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap...8

- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Dusun tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Dusun yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa setiap minggu.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Rio menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Rio tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Dusun dan Pemberdayaan Masyarakat Dusun.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Dusun berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 15

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Dusun.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Dusun yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

(4) Peningkatan...IO

- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 16

Dusun yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan

Pasal 17

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
- (2) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Dusun dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Dusun (RKPDus).

Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Dusun mengenai APBDus.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Dusun setempat.
- (2) Rio bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa

BAB VIII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Sekretaris Dusun melalui Kepala Urusan Keuangan menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan laporan pencegahan stunting tingkat Dusun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Rio kepada Bupati sebagai bagian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

(3) Laporan... 11

- (3) Laporan disampaikan sesuai kebutuhan disetiap tahapan penyaluran sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa

Pasal 22

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. melalui perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Dusun meminta penjelasan kepada Rio mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 8 - 1 - 2020

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR 01 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
 DUSUN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PAGU DANA DESA SETIAP DUSUN KABUPATEN BUNGO
 TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Afirmasi | Alokasi Kinerja | Alokasi Formula | Pagu Dana Desa per-Desa |
|-----|-----------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Tanah Tumbuh | Pedukun | 662,806,000 | - | - | 91,716,000 | 754,522,000 |
| 2 | Tanah Tumbuh | Lubuk Niur | 662,806,000 | - | - | 71,754,000 | 734,560,000 |
| 3 | Tanah Tumbuh | Teluk Kecimbung | 662,806,000 | - | - | 83,709,000 | 746,515,000 |
| 4 | Tanah Tumbuh | Tanah Tumbuh | 662,806,000 | - | - | 52,459,000 | 715,265,000 |
| 5 | Tanah Tumbuh | Rambah | 662,806,000 | - | - | 102,775,000 | 765,581,000 |
| 6 | Tanah Tumbuh | Tebing Tinggi Uleh | 662,806,000 | - | - | 85,834,000 | 748,640,000 |
| 7 | Tanah Tumbuh | Bukit Kemang | 662,806,000 | - | - | 103,228,000 | 766,034,000 |
| 8 | Tanah Tumbuh | Panjang | 662,806,000 | - | - | 265,435,000 | 928,241,000 |
| 9 | Tanah Tumbuh | Perenti Luweh | 662,806,000 | - | - | 116,276,000 | 779,082,000 |
| 10 | Tanah Tumbuh | Renah Ilmu | 662,806,000 | - | - | 92,445,000 | 755,251,000 |
| 11 | Tanah Tumbuh | Koto Jayo | 662,806,000 | - | - | 66,826,000 | 729,632,000 |
| 12 | Rantau Pandan | Rantau Duku | 662,806,000 | - | - | 154,724,000 | 817,530,000 |
| 13 | Rantau Pandan | Talang Sungai Bungo | 662,806,000 | - | - | 190,375,000 | 853,181,000 |
| 14 | Rantau Pandan | Rantau Pandan | 662,806,000 | - | - | 226,920,000 | 889,726,000 |
| 15 | Rantau Pandan | Leban | 662,806,000 | 181,634,000 | - | 1,249,137,000 | 2,093,577,000 |
| 16 | Rantau Pandan | Lubuk Kayu Aro | 662,806,000 | - | - | 97,240,000 | 760,046,000 |
| 17 | Rantau Pandan | Lubuk Mayan | 662,806,000 | - | - | 74,035,000 | 736,841,000 |
| 18 | Jujuhan | Tanjung Belit | 662,806,000 | - | 144,096,000 | 139,435,000 | 946,337,000 |
| 19 | Jujuhan | Rantau Ikil | 662,806,000 | - | - | 175,860,000 | 838,666,000 |
| 20 | Jujuhan | Pulau Ilmu | 662,806,000 | - | - | 162,949,000 | 825,755,000 |
| 21 | Jujuhan | Sirih Sekapur | 662,806,000 | - | - | 130,504,000 | 793,310,000 |
| 22 | Jujuhan | Ujung Tanjung | 662,806,000 | - | - | 125,578,000 | 788,384,000 |
| 23 | Jujuhan | Jumbak | 662,806,000 | - | - | 107,022,000 | 769,828,000 |
| 24 | Jujuhan | Rantau Panjang | 662,806,000 | - | 144,096,000 | 161,569,000 | 968,471,000 |
| 25 | Jujuhan | Talang Pamesun | 662,806,000 | - | - | 109,454,000 | 772,260,000 |
| 26 | Jujuhan | Baru Balai Panjang | 662,806,000 | - | - | 131,421,000 | 794,227,000 |
| 27 | Jujuhan | Sirih Sekapur Perkembangan | 662,806,000 | - | - | 118,813,000 | 781,619,000 |
| 28 | Tanah Sepenggal | Teluk Pandak | 662,806,000 | - | - | 259,967,000 | 922,773,000 |
| 29 | Tanah Sepenggal | Empelu | 662,806,000 | - | - | 98,608,000 | 761,414,000 |
| 30 | Tanah Sepenggal | Pasar Lubuk Landai | 662,806,000 | - | - | 103,305,000 | -766,111,000 |
| 31 | Tanah Sepenggal | Sungai Gambir | 662,806,000 | - | - | 236,435,000 | 899,241,000 |
| 32 | Tanah Sepenggal | Candi | 662,806,000 | - | - | 82,669,000 | 745,475,000 |
| 33 | Tanah Sepenggal | Tanjung | 662,806,000 | - | - | 129,793,000 | 792,599,000 |

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Afirmasi | Alokasi Kinerja | Alokasi Formula | Pagu Dana Desa per-Desa |
|-----|------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 34 | Tanah Sepenggal | Tanah Bekali | 662,806,000 | - | 144,096,000 | 129,712,000 | 936,614,000 |
| 35 | Tanah Sepenggal | Telentam | 662,806,000 | - | - | 95,929,000 | 758,735,000 |
| 36 | Tanah Sepenggal | Pasar Rantau Embacang | 662,806,000 | - | - | 234,210,000 | 897,016,000 |
| 37 | Tanah Sepenggal | Tenam | 662,806,000 | - | - | 465,614,000 | 1,128,420,000 |
| 38 | Pelepat | Baru Pelepat | 662,806,000 | - | - | 185,773,000 | 848,579,000 |
| 39 | Pelepat | Dwi Karya Bakti | 662,806,000 | - | - | 236,019,000 | 898,825,000 |
| 40 | Pelepat | Rantau Kelayang | 662,806,000 | - | - | 223,116,000 | 885,922,000 |
| 41 | Pelepat | Balai Jaya | 662,806,000 | - | - | 143,741,000 | 806,547,000 |
| 42 | Pelepat | Rantel | 662,806,000 | - | - | 153,086,000 | 815,892,000 |
| 43 | Pelepat | Senamat | 662,806,000 | - | - | 146,855,000 | 809,661,000 |
| 44 | Pelepat | Sungai Beringin | 662,806,000 | - | - | 252,209,000 | 915,015,000 |
| 45 | Pelepat | Sungai Gurun | 662,806,000 | - | - | 62,818,000 | 725,624,000 |
| 46 | Pelepat | Batu Kerbau | 662,806,000 | - | 144,096,000 | 249,028,000 | 1,055,930,000 |
| 47 | Pelepat | Gapura Suci | 662,806,000 | - | - | 366,457,000 | 1,029,263,000 |
| 48 | Pelepat | Mulya Bakti | 662,806,000 | - | 144,096,000 | 106,069,000 | 912,971,000 |
| 49 | Pelepat | Mulya Jaya | 662,806,000 | - | - | 143,484,000 | 806,290,000 |
| 50 | Pelepat | Cilodang | 662,806,000 | - | - | 77,311,000 | 740,117,000 |
| 51 | Pelepat | Bukit Telago | 662,806,000 | - | - | 152,070,000 | 814,876,000 |
| 52 | Pelepat | Sekampil | 662,806,000 | - | - | 106,804,000 | 769,610,000 |
| 53 | Limbur Lubuk Mengkuang | Tanjung Bungo | 662,806,000 | - | - | 81,639,000 | 744,445,000 |
| 54 | Limbur Lubuk Mengkuang | Tuo Lbk. Mengkuang | 662,806,000 | - | - | 110,345,000 | 773,151,000 |
| 55 | Limbur Lubuk Mengkuang | Pauh Agung | 662,806,000 | - | - | 98,773,000 | 761,579,000 |
| 56 | Limbur Lubuk Mengkuang | Tuo Limbur | 662,806,000 | - | - | 144,800,000 | 807,606,000 |
| 57 | Limbur Lubuk Mengkuang | Renah Sungai Besar | 662,806,000 | - | - | 79,767,000 | 742,573,000 |
| 58 | Limbur Lubuk Mengkuang | Muaro Tebo Pandak | 662,806,000 | - | - | 103,167,000 | 765,973,000 |
| 59 | Limbur Lubuk Mengkuang | Rantau Tipu | 662,806,000 | - | - | 143,835,000 | 806,641,000 |
| 60 | Limbur Lubuk Mengkuang | Baru Lbk. Mengkuang | 662,806,000 | - | - | 101,177,000 | 763,983,000 |
| 61 | Limbur Lubuk Mengkuang | Lbk. Tanah Terban | 662,806,000 | - | - | 298,442,000 | 961,248,000 |
| 62 | Limbur Lubuk Mengkuang | Pemunyan | 662,806,000 | 181,634,000 | - | 1,516,066,000 | 2,360,506,000 |
| 63 | Limbur Lubuk Mengkuang | Renah Sungai Ipuh | 662,806,000 | - | - | 108,425,000 | 771,231,000 |
| 64 | Limbur Lubuk Mengkuang | Tebo Jaya | 662,806,000 | - | - | 90,362,000 | 753,168,000 |
| 65 | Limbur Lubuk Mengkuang | Sekar Mengkuang | 662,806,000 | - | - | 92,175,000 | 754,981,000 |
| 66 | Limbur Lubuk Mengkuang | Limbur Baru | 662,806,000 | - | - | 96,232,000 | 759,038,000 |
| 67 | Muko-muko Bathin VII | Mangun Jayo | 662,806,000 | - | - | 113,239,000 | 776,045,000 |
| 68 | Muko-muko Bathin VII | Tanjung Agung | 662,806,000 | - | - | 134,925,000 | 797,731,000 |
| 69 | Muko-muko Bathin VII | Tebat | 662,806,000 | - | - | 79,785,000 | 742,591,000 |
| 70 | Muko-muko Bathin VII | Baru Pusat Jalo | 662,806,000 | - | - | 73,284,000 | 736,090,000 |
| 71 | Muko-muko Bathin VII | Bedaro | 662,806,000 | - | 144,096,000 | 119,379,000 | 926,281,000 |
| 72 | Muko-muko Bathin VII | Tebing Tinggi | 662,806,000 | - | - | 77,125,000 | 739,931,000 |
| 73 | Muko-muko Bathin VII | Datar | 662,806,000 | - | - | 168,171,000 | 830,977,000 |
| 74 | Muko-muko Bathin VII | Suka Jaya | 662,806,000 | - | - | 59,878,000 | 722,684,000 |
| 75 | Muko-muko Bathin VII | Pekan Jum'at | 662,806,000 | - | - | 127,990,000 | 790,796,000 |
| 76 | Pelepat Ilir | Koto Jayo | 662,806,000 | - | - | 144,900,000 | 807,706,000 |

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Afirmasi | Alokasi Kinerja | Alokasi Formula | Pagu Dana Desa per-Desa |
|-----|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 77 | Pelepat Ilir | Danau | 662,806,000 | - | - | 182,275,000 | 845,081,000 |
| 78 | Pelepat Ilir | Muara Kuamang | 662,806,000 | - | - | 167,168,000 | 829,974,000 |
| 79 | Pelepat Ilir | Lubuk | 662,806,000 | - | 144,096,000 | 84,527,000 | 891,429,000 |
| 80 | Pelepat Ilir | Purwosari | 662,806,000 | - | - | 156,013,000 | 818,819,000 |
| 81 | Pelepat Ilir | Lembah Kuamang | 662,806,000 | - | - | 95,317,000 | 758,123,000 |
| 82 | Pelepat Ilir | Sumber Harapan | 662,806,000 | - | - | 139,833,000 | 802,639,000 |
| 83 | Pelepat Ilir | Daya Murni | 662,806,000 | - | - | 90,859,000 | 753,665,000 |
| 84 | Pelepat Ilir | Sumber Mulya | 662,806,000 | - | 144,096,000 | 81,992,000 | 888,894,000 |
| 85 | Pelepat Ilir | Maju Jaya | 662,806,000 | - | - | 127,161,000 | 789,967,000 |
| 86 | Pelepat Ilir | Tirta Mulya | 662,806,000 | - | - | 140,294,000 | 803,100,000 |
| 87 | Pelepat Ilir | Lingga Kuamang | 662,806,000 | - | - | 126,955,000 | 789,761,000 |
| 88 | Pelepat Ilir | Bangun Harjo | 662,806,000 | - | 144,096,000 | 79,031,000 | 885,933,000 |
| 89 | Pelepat Ilir | Kuning gading | 662,806,000 | - | - | 105,130,000 | 767,936,000 |
| 90 | Pelepat Ilir | Kuamang Jaya | 662,806,000 | - | - | 81,730,000 | 744,536,000 |
| 91 | Pelepat Ilir | Karya Harapan Mukti | 662,806,000 | - | - | 123,344,000 | 786,150,000 |
| 92 | Pelepat Ilir | Padang Palangeh | 662,806,000 | - | - | 149,604,000 | 812,410,000 |
| 93 | Batin II Babeko | Tanjung Menanti | 662,806,000 | - | - | 110,789,000 | 773,595,000 |
| 94 | Batin II Babeko | Babeko | 662,806,000 | - | - | 119,701,000 | 782,507,000 |
| 95 | Batin II Babeko | Sepunggur | 662,806,000 | - | - | 201,581,000 | 864,387,000 |
| 96 | Batin II Babeko | Simpang Bebeko | 662,806,000 | - | - | 129,967,000 | 792,773,000 |
| 97 | Batin II Babeko | Suka Makmur | 662,806,000 | - | - | 74,809,000 | 737,615,000 |
| 98 | Batin II Babeko | Tuo Sepunggur | 662,806,000 | - | - | 164,854,000 | 827,660,000 |
| 99 | Bathin III | Lubuk Benteng | 662,806,000 | - | - | 248,487,000 | 911,293,000 |
| 100 | Bathin III | Air Gemuruh | 662,806,000 | - | - | 130,486,000 | 793,292,000 |
| 101 | Bathin III | Purwo Bakti | 662,806,000 | - | - | 305,127,000 | 967,933,000 |
| 102 | Bathin III | Sarana Jaya | 662,806,000 | - | - | 92,303,000 | 755,109,000 |
| 103 | Bathin III | Teluk Panjang | 662,806,000 | - | - | 98,710,000 | 761,516,000 |
| 104 | Bungo Dani | Talang Pantai | 662,806,000 | - | - | 412,038,000 | 1,074,844,000 |
| 105 | Bungo Dani | Sungai Arang | 662,806,000 | - | - | 237,743,000 | 900,549,000 |
| 106 | Bungo Dani | Pulau Pekan | 662,806,000 | - | - | 69,670,000 | 732,476,000 |
| 107 | Rimbo Tengah | Sungai Mengkuang | 662,806,000 | - | - | 233,173,000 | 895,979,000 |
| 108 | Rimbo Tengah | Sungai Buluh | 662,806,000 | - | - | 190,080,000 | 852,886,000 |
| 109 | Bathin III Ulu | Muara Buat | 662,806,000 | - | - | 81,209,000 | 744,015,000 |
| 110 | Bathin III Ulu | Buat | 662,806,000 | - | - | 209,245,000 | 872,051,000 |
| 111 | Bathin III Ulu | Laman Panjang | 662,806,000 | - | - | 182,840,000 | 845,646,000 |
| 112 | Bathin III Ulu | Karak Apung | 662,806,000 | - | - | 187,732,000 | 850,538,000 |
| 113 | Bathin III Ulu | Timbolasi | 662,806,000 | - | - | 95,385,000 | 758,191,000 |
| 114 | Bathin III Ulu | Senamat Ulu | 662,806,000 | - | - | 164,195,000 | 827,001,000 |
| 115 | Bathin III Ulu | Aur Cino | 662,806,000 | - | - | 194,384,000 | 857,190,000 |
| 116 | Bathin III Ulu | Lubuk Beringin | 662,806,000 | - | - | 105,274,000 | 768,080,000 |
| 117 | Bathin III Ulu | Sungai Telang | 662,806,000 | - | - | 200,406,000 | 863,212,000 |
| 118 | Bathin II Pelayang | Pelayang | 662,806,000 | - | - | 88,317,000 | 751,123,000 |
| 119 | Bathin II Pelayang | Peninjau | 662,806,000 | - | - | 176,727,000 | 839,533,000 |

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Afirmasi | Alokasi Kinerja | Alokasi Formula | Pagu Dana Desa per-Desa |
|--------------|------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 120 | Bathin II Pelayang | Talang Silungko | 662,806,000 | - | - | 197,856,000 | 860,662,000 |
| 121 | Bathin II Pelayang | Pulau Kerakap | 662,806,000 | - | 144,096,000 | 109,113,000 | 916,015,000 |
| 122 | Bathin II Pelayang | Seberang Jaya | 662,806,000 | - | - | 98,767,000 | 761,573,000 |
| 123 | Jujuhan Ilir | Tepian Danto | 662,806,000 | - | - | 81,512,000 | 744,318,000 |
| 124 | Jujuhan Ilir | Aur Gading | 662,806,000 | - | - | 94,415,000 | 757,221,000 |
| 125 | Jujuhan Ilir | Pulau Batu | 662,806,000 | - | - | 65,805,000 | 728,611,000 |
| 126 | Jujuhan Ilir | Sari Mulya | 662,806,000 | - | - | 141,493,000 | 804,299,000 |
| 127 | Jujuhan Ilir | Bukit Sari | 662,806,000 | - | - | 73,199,000 | 736,005,000 |
| 128 | Jujuhan Ilir | Lubuk Tenam | 662,806,000 | - | - | 327,719,000 | 990,525,000 |
| 129 | Jujuhan Ilir | Kuamang | 662,806,000 | - | 144,096,000 | 68,503,000 | 875,405,000 |
| 130 | Tanah Sepenggal Lintas | Sungai Mancur | 662,806,000 | - | - | 335,014,000 | 997,820,000 |
| 131 | Tanah Sepenggal Lintas | Tanah Periuk | 662,806,000 | - | - | 124,825,000 | 787,631,000 |
| 132 | Tanah Sepenggal Lintas | Lubuk Landai | 662,806,000 | - | - | 196,379,000 | 859,185,000 |
| 133 | Tanah Sepenggal Lintas | Rantau Embacang | 662,806,000 | - | - | 87,664,000 | 750,470,000 |
| 134 | Tanah Sepenggal Lintas | Tebing Tinggi | 662,806,000 | - | 144,096,000 | 131,896,000 | 938,798,000 |
| 135 | Tanah Sepenggal Lintas | Embacang Gedang | 662,806,000 | - | - | 77,146,000 | 739,952,000 |
| 136 | Tanah Sepenggal Lintas | Sungai Puri | 662,806,000 | - | - | 75,554,000 | 738,360,000 |
| 137 | Tanah Sepenggal Lintas | Paku Aji | 662,806,000 | - | - | 87,348,000 | 750,154,000 |
| 138 | Tanah Sepenggal Lintas | Pematang Panjang | 662,806,000 | - | 144,096,000 | 141,699,000 | 948,601,000 |
| 139 | Tanah Sepenggal Lintas | Sungai Lilin | 662,806,000 | - | - | 231,835,000 | 894,641,000 |
| 140 | Tanah Sepenggal Lintas | Sungai Tembang | 662,806,000 | - | 144,096,000 | 142,750,000 | 949,652,000 |
| 141 | Tanah Sepenggal Lintas | Rantau Makmur | 662,806,000 | - | - | 128,078,000 | 790,884,000 |
| Total | | | 93,455,646,000 | 363,268,000 | 2,017,344,000 | 22,547,491,000 | 118,383,749,000 |

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI